

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KOTA MALANG: DALAM PERSPEKTIF KAJIAN BUDAYA

Trisakti Handayani (trisakti@umm.ac.id)
Prof. Dr. I Gde Parimatha, M.A. (Promotor)
Prof. Dr. Ir. Hj. Keppi Sukesi, M.S. (Kopromotor I)
Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A. (Kopromotor II)

ABSTRAK

Keputusan pemerintah untuk merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi perempuan di bawah departemen dalam federasi mengakibatkan lahirnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu organisasi yang mewadahi perempuan yang tidak berada di bawah departemen. Kehadiran PKK selain diharapkan mampu membawa keluarga pada kondisi sejahtera dan mandiri, juga mampu membebaskan perempuan dari belenggu budaya patriarkhi. Namun, kenyataannya PKK belum sepenuhnya mampu mengubah kondisi keluarga dan perempuan, sehingga belum terwujud kesetaraan dan keadilan gender. Adanya kesenjangan ini menyebabkan perlunya melakukan penelitian terhadap PKK, khususnya di kota Malang. Penelitian ini bertujuan mengkaji: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya PKK; (2) paradigma kelembagaan yang dikembangkan PKK; dan (3) makna PKK dikaitkan dengan kesetaraan dan keadilan gender.

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Malang, dengan subjek: PKK kota Malang, kecamatan Lowokwaru dan kelurahan Lowokwaru. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*. Teknik pengumpulan data melalui: observasi partisipasi, wawancara dan, pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan interpretatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya PKK adalah: politik, ekonomi, sosial dan budaya. Faktor ekonomi merupakan faktor paling berpengaruh pada awal kemunculan PKK, namun dalam perkembangannya faktor politik menjadi dominan karena terjadinya politisasi gerakan perempuan; (2) paradigma kelembagaan yang dikembangkan PKK adalah paradigma dari atas ke bawah (*top down*) dan bergerak dari konsep pendidikan, pembinaan, dan pemberdayaan; (3) makna PKK dikaitkan dengan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu makna keharmonisan, makna solidaritas, makna keadilan, makna keselarasan, dan makna keseimbangan.

Kata kunci: kemandirian perempuan, paradigma kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan

PENDAHULUAN

Keputusan pemerintah untuk merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi perempuan di bawah departemen dalam federasi mengakibatkan lahirnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu organisasi yang mewadahi perempuan yang tidak berada di bawah departemen. Organisasi ini bermula dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang berupaya melibatkan partisipasi dan merupakan program pendidikan perempuan. Selanjutnya organisasi ini berubah menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang berupaya tidak hanya mendidik perempuan, melainkan membina dan membangun keluarga di bidang mental spiritual dan fisik material serta peningkatan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Bergulirnya reformasi dan disyahkannya GBHN 1999 oleh MPR serta adanya paradigma baru pembangunan dan semangat otonomi daerah, maka kepanjangan PKK berubah menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yaitu sebuah organisasi yang melibatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

PKK yang merekrut anggota sampai lapisan bawah masyarakat diharapkan mampu membawa pada kondisi keluarga yang sejahtera, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia baik secara material, sosial, mental dan spiritual serta keluarga yang berdaya yaitu keluarga yang hidup sejahtera, maju dan mandiri. Selain itu, PKK diharapkan mampu membebaskan perempuan dari belenggu budaya patriarkhi, sehingga memiliki kemandirian. Melalui PKK diharapkan harkat dan martabat perempuan sebagai bagian dari keluarga dapat ditingkatkan. Namun, pada kenyataannya PKK belum sepenuhnya mampu merubah kondisi keluarga dan perempuan, sehingga belum terwujud kesetaraan dan keadilan gender. Adanya kesenjangan ini menyebabkan perlunya melakukan penelitian terhadap PKK, khususnya di kota Malang.

Secara umum penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di kota Malang dari perspektif kajian budaya dalam upaya mewujudkan PKK yang profesional, mandiri, berkesetaraan dan berkeadilan gender. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan: (1) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya PKK; (2) menjelaskan

paradigma kelembagaan yang dikembangkan PKK; dan (3) menjelaskan makna PKK dikaitkan dengan kesetaraan dan keadilan gender

Secara akademik penelitian ini bermanfaat untuk: (1) menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam permasalahan sosial secara kritis, sehubungan dengan eksistensi PKK, yang membawa perubahan pada perilaku budaya perempuan; (2) membangun dasar-dasar pijakan untuk mengembangkan penelitian di masa mendatang, khususnya dalam perspektif kajian budaya, sehingga dapat memahami PKK dalam konteks yang lebih luas serta menunjang kemajuan penelitian tentang organisasi perempuan Indonesia. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi: (1) PKK, sebagai bahan pertimbangan dalam upaya menata kembali paradigma kelembagaan, sehingga mampu meningkatkan peran dan kemandiriannya, serta mampu menghadapi tantangan jaman; (2) pemerintah dan atau semua pihak (*stake holder*), yang kompeten dalam merumuskan kebijakan dan menyusun program, khususnya dalam mewujudkan pemberdayaan organisasi perempuan, sehingga terwujud kebijakan dan program yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender.

MATERI DAN DISKUSI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan meliputi: observasi partisipasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini mengambil lokasi di kota Malang. Subjek penelitian adalah PKK kota Malang, kecamatan Lowokwaru dan kelurahan Lowokwaru. Data primer bersumber dari informan yang meliputi: ketua TP-PKK, ketua dewan penyantun TP-PKK, dan anggota PKK baik yang ada di kota Malang, kecamatan Lowokwaru maupun kelurahan Lowokwaru, pimpinan organisasi perempuan (Aisyiyah, Muslimat NU, GOW) kota Malang dan Dr. Effendi Kadarisman seorang ahli naskah Jawa. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PKK dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: wawancara mendalam, observasi partisipasi, catatan lapangan, dan dokumen. Analisis dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif

dan interpretatif. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk formal maupun informal. bentuk formal meliputi: tabel berupa angka maupun kata-kata atau *phrase* verbal. Sedangkan bentuk informal berupa narasi.

Untuk menjawab permasalahan penelitian digunakan pendekatan kajian budaya (*cultural studies*) yang berusaha melihat problematika secara lebih luas dan komprehensif. Teori yang digunakan adalah teori hegemoni, dekonstruksi dan feminis posmodern. Ketiga teori ini sangat diperlukan, karena mampu mengungkap permasalahan tersembunyi dalam PKK, yang menyebabkan PKK kehilangan kekuatan dan pengaruhnya dalam memperjuangkan perubahan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, khususnya perempuan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya PKK adalah: politik, ekonomi, sosial dan budaya. Eksistensi PKK tidak dapat dilepaskan dari persaingan dua aliran politik dalam kekuasaan, yaitu golongan komunis dan non-komunis pada akhir pemerintahan Orde Lama, di samping faktor politik makro, yaitu berhubungan dengan politik gender yang mengarahkan perempuan berperan sebagai ibu dan istri, maupun faktor politik mikro yang mendefinisikan masalah perempuan dalam kerangka kebutuhan dasar keluarga. Dari aspek ekonomi, terjadinya kemiskinan yang melanda sebagian masyarakat Indonesia dan transformasi dari sistem agraris menjadi industrial mengakibatkan timbulnya pembagian kerja, laki-laki di sektor publik dan perempuan di sektor domestik, sehingga perempuan kembali dalam kehidupan rumah tangga dan menyebabkan terjadinya domestikasi yang tercermin pada pembentukan organisasi perempuan pada masa Orde Baru, dalam bentuk PKK. Secara sosial eksistensi PKK tidak dapat dilepaskan dari gerakan sosial yang bertujuan mengadakan perubahan dan tuntutan feminisme dalam mewujudkan emansipasi perempuan dan kesetaraan gender, meskipun tuntutan ini tidak ditonjolkan karena emansipasi perempuan dan kesetaraan gender dianggap akan tercapai bersamaan dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sementara itu, munculnya PKK didasarkan pada nilai-nilai budaya Jawa yang menekankan pada budaya patriarki yang tercermin dalam 10 program pokok PKK. Aspek ekonomi merupakan aspek yang berpengaruh dominan pada awal kemunculan PKK, karena adanya kemiskinan. Namun dalam

perkembangannya aspek politik menjadi sangat berpengaruh karena terjadinya politisasi gerakan perempuan dengan mendirikan organisasi isteri termasuk PKK. Hegemoni kekuasaan berperan penting dalam pembentukan PKK, hal ini ditunjukkan dengan terbitnya Surat Kawat Mendagri Nomor: SUS/3/6/12 tertanggal 27 Desember 1972.

Paradigma kelembagaan yang dikembangkan PKK adalah paradigma dari atas ke bawah (*top down*) dan berdasarkan struktur hirarki kedinasan dari tingkat pusat sampai daerah yang direpresentasikan dengan adanya dewan penyantun, sehingga narasi besar tetap berpeluang untuk mendominasi kebijakan dan melakukan kontrol terhadap program-program yang dilakukan PKK. Paradigma ini bergerak dari konsep pendidikan, pembinaan, dan pemberdayaan. Paradigma pendidikan mengarahkan PKK bertanggung jawab pada sektor domestik, sementara paradigma pembinaan menyebabkan beban PKK semakin besar karena bertanggung jawab terhadap keluarga. Selanjutnya, dikembangkan paradigma pemberdayaan agar PKK mampu melakukan upaya pemberdayaan keluarga meskipun pada kenyataannya kekuasaan tetap melakukan kontrol. Pada paradigma pendidikan dan pembinaan, kekuasaan secara langsung melakukan hegemoni, sementara pada paradigma pemberdayaan, muncul kesadaran dari kekuasaan untuk melakukan pemberdayaan meskipun kenyataannya hanya sebatas slogan, sehingga PKK tetap menjadi gerakan statis. Dekonstruksi atas kelembagaan PKK perlu dilakukan agar PKK dapat menjadi organisasi yang mandiri dan berdaya.

Makna PKK dikaitkan dengan perspektif kesetaraan dan keadilan gender adalah keharmonisan, solidaritas, keadilan, keselarasan, dan keseimbangan. Makna keharmonisan menunjukkan bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang bertujuan membangun keharmonisan keluarga; dan (2) organisasi yang mengarahkan perempuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, yaitu keluarga yang berada dalam kondisi damai, tentram, dan nyaman. Makna solidaritas menunjukkan bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang tumbuh sebagai bentuk solidaritas terhadap gerakan perempuan; (2) organisasi yang berusaha meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Makna keadilan menunjukkan bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang berupaya mewujudkan

keadilan dalam keluarga dan masyarakat; (2) organisasi yang berupaya mewujudkan keadilan gender, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang sama dalam kehidupan, karena selama ini perempuan dianggap sebagai *other* (*Liyan*) sedangkan laki-laki adalah *self* (*Diri*). Makna keselarasan menunjukkan bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang berupaya menuju terciptanya suasana yang tertib, teratur, aman, dan damai, sehingga timbul ketentraman lahir batin dalam keluarga; (2) organisasi yang berusaha menuju pada terwujudnya perilaku yang baik, sopan berdasarkan tata tertib masyarakat yang penuh rasa tanggung jawab, sehingga tidak terjadi hegemoni, dominasi, subordinasi dan marginalisasi perempuan. Makna keseimbangan menunjukkan bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang berupaya menuju terciptanya kesetaraan dalam keluarga dan masyarakat; (2) organisasi yang berupaya mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, agar memiliki kedudukan dan peran yang sama dalam kehidupan.

TEMUAN BARU PENELITIAN

Temuan baru dalam penelitian ini adalah: (1) paradigma pemberdayaan yang dikembangkan PKK mengisyaratkan terjadinya perubahan organisasi menuju pada kemandirian, meskipun belum dilakukan secara optimal, karena kekuasaan tetap melakukan pengontrolan, sehingga hubungan yang terjalin antara kekuasaan dengan PKK adalah hegemoni; (2) eksistensi PKK memberi wadah kepada perempuan untuk beraktivitas dalam kecenderungan koridor kekuasaan (laki-laki); (3) PKK di kota Malang telah melakukan upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender, yang diperlihatkan dengan keterlibatan laki-laki dalam kepengurusan, meskipun eksistensinya belum berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program organisasi, karena PKK masih berorientasi pada kebijakan dari atas (*top down*).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah: (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya PKK adalah: faktor politik, ekonomi, sosial dan

budaya; (2) paradigma kelembagaan yang dikembangkan PKK adalah paradigma dari atas ke bawah (*top down*) dan bergerak dari konsep pendidikan, pembinaan, dan pemberdayaan; (3) makna PKK dikaitkan dengan perspektif kesetaraan dan keadilan gender, yaitu makna keharmonisan, makna solidaritas, makna keadilan, makna keselarasan, dan makna keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, C. 2004. *Cultural Studies, Teori dan Praktik*. Terjemahan. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri. 2005. *Hasil Rapat Kerja Nasional VI PKK*. Jakarta.
- Hadiz, L. 2004. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES.
- Lubis, A.Y. 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern: dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme Hingga Cultural Studies*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Murniati, A.N.P. 2004. *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*. Buku Kedua. Magelang: Indonesiatara.
- Simon, R. 2000. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tong, R.P. 1999. *Feminist Thought*. Aquarini Priyatna Prabasmoro, terjemahan. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wieringa, S. 1998. *Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*. Terjemahan. Jakarta: Kalyanamitra.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. I Gde Parimatha M.A., selaku promotor, Prof. Dr. Hj. Keppi Sukesu, M.S., selaku ko promotor I, dan Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A., selaku ko promotor II, yang dengan penuh perhatian, kesabaran, ketelatenan, dan ketelitian telah mendorong dan memotivasi penulis mulai dari penyusunan proposal hingga selesainya disertasi ini. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada instansi yang telah memberikan bantuan beasiswa melalui BPPS (P2T) Universitas Udayana serta kepada Rektor, Direktur Pascasarjana beserta staf, Ketua Program Pendidikan Doktor Kajian Budaya beserta Staf.

**FAMILY EMPOWERMENT AND PROSPERITY (PKK) IN MALANG
CITY:
A CULTURAL STUDIES PERSPECTIVE**

Trisakti Handayani (trisakti@umm.ac.id)

Prof. Dr. I Gde Parimartha, M.A. (Promotor)

Prof. Dr. Ir. Hj. Keppi Sukesu, M.S. (Co-promotor I)

Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A. (Co-promotor II)

The government decision to revitalize and to group woman organization under a department into a federation results in the establishment of *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*, 'Family Empowerment and Welfare' (PKK), an organization that accommodates woman who don't belong to any department. In addition to being able to bring family into independent and prosperous conditions, the introduction of PKK is also expected to free woman from patriarchal cultural bond. However, the reality is that PKK hasn't fully been able to change the conditions of family and woman to realize gender equality and justice. Based on these conditions it is considered necessary to make a study on PKK especially in Malang city. The research is aimed at studying (1) factors influencing the establishment of PKK; (2) institutional paradigm developed by PKK; and (3) the significance of PKK in relation to gender equality and justice.

The location of research is Malang city using PKK of Malang city, Lowokwaru district and Lowokwaru village as the subject of study. In the process of study a qualitative approach was applied. The informants were purposively determined. The data were collected through participatory observation, interviews, and the use of documents. The analysis was done descriptively, qualitatively and interpretatively.

The result of analysis indicates that (1) factors influencing the establishment of PKK are: political, economical, social and cultural. Economic factor became the most influencing factor for the emergence of PKK, but later in its development, political factor became dominant due to the politicization of woman movement; (2) the institutional paradigm developed by PKK is top-down paradigm and departs from the concept of education, maintenance, and empowerment; (3) the values of PKK are related to gender equality and justice, including values of harmony, solidarity, justice, compatibility, and equilibrium.

Keywords: independence, gender equality and justice, woman empowerment.

INTRODUCTION

The government decision to revitalize and to group woman organization under a department into a federation results in the establishment of *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*, 'Family Empowerment and Welfare' (PKK), an organization that accommodates woman who don't belong to any department. The organization originated from *Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* (Family Welfare Education) that tried to involve woman and became woman education program. Later the organization changed into *Pembinaan Kesejahteraan Keluarga* (Family Welfare Maintenance) that endeavored not only to educate woman, but to build and develop families physically and spiritually as well as to improve the quality of their food, clothes, shelter, health, and living environment. The introduction of reformation and the approval of GBHN 1999 by MPR and the new development paradigm supported by the spirit of regional autonomy, PKK later stood for *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*, (Family Empowerment and Welfare), an organization that involves woman and men participation to create prosperous family.

PKK that recruits members up to the lowest level of society is expected to bring about a more prosperous family condition, a family being able to satisfy basic human material, social, mental, and spiritual needs, that is to say, an empowered, prosperous, developed and independent family. Besides, PKK is expected to be able to free woman from patriarchal cultural bond in order to become independent. Through PKK it is hoped that woman dignity and pride as part of family could be improved. However, PKK, so far, hasn't been able to fully change the family and woman condition so that gender equality and justice could not be realized. This gap necessitates a research on PKK, especially in Malang city.

In general, the research is aimed at studying the existence of PKK in Malang city from cultural studies perspective in order to realize a professional and independent PKK with gender equality and justice. Specifically the research is aimed at (1) describing the factors that influence the establishment of PKK; (2)

explaining the institutional paradigm developed by PKK, and (3) describing the significance of PKK in relation to gender equality and justice.

Academically, this research is beneficial to (1) increasing science heritage, particularly related to social phenomenon resulting from the introduction of PKK that brings about changes to woman cultural behavior; (2) building up a stepping stone to develop further fundamental research in the future, especially from cultural studies perspective in order to comprehend PKK in its wider contexts and to support researches on Indonesian woman organization. Practically this study is beneficial to (1) PKK as a feedback to consider a reformulation of the institutional paradigm so as to make it possible to improve its role and independence as well as to be able to cope with current challenges; (2) the government and or all stakeholders competent in formulating policy and program designing particularly in the realization of woman organization empowerment in order to actualize a policy and paradigm reflecting gender equality and justice perspective.

MATERIALS AND DISCUSSION

The research applies a qualitative approach. The qualitative method used includes participatory observation, interviews, and the use of document. The research is descriptive analytic in nature carried out in Malang city. The subject of research is PKK Malang, Lowokwaru district and Lowokwaru village. The primary data were taken from informants including: head of TP-PKK, patrons of TP-PKK and PKK members found in Malang city, Lowokwaru district and Lowokwaru village, heads of woman organization (Aisyiyah, Muslimat NU, GOW) of Malang city and Dr. Effendi Kadarisman, an expert of Javanese manuscripts. The secondary data were taken from some documents related to PKK and reports of previous studies. The method of collecting data includes depth interview, participatory observation, field note-taking, and documentation. The analysis was done descriptively, qualitatively and interpretatively. The result of analysis is presented in both formal and non formal ways. The formal way takes the form of tables of figures and words or verbal phrases while the non formal takes the form of narration

To answer the research questions, a cultural studies approach was applied to consider the problems more widely and comprehensively. The theory used includes hegemony, deconstruction and postmodern feminism. The three theories are considered appropriate to unveil the hidden problem of PKK, that caused PKK to loose its strength and influence in its endeavor to struggle for changes related to family life especially women.

Various factors influencing the introduction of PKK are political, economical, social and cultural. The existence of PKK could not be separated from the competition of two political schools in power, i.e. communist and non-communist parties by the end of the Old Order reign in addition to macro political factor related to politics of gender that led woman role as a mother and wife and micro politics that defined the problem of women part of family basic necessity frame of thought. From the economic aspect, poverty suffered by most Indonesian society and the transformation from agrarian system into industrial one resulted in work division, in which men were in public sector while woman in domestic sector so that woman remained in the routine of household life causing a domestication reflected in the foundation of woman organization during the New Order era named PKK. Socially, the existence of KK could not be separated from the social movement aiming at making changes and feminism movement to actualize woman liberation/emancipation and gender equality although the demand was not emphasized since women emancipation and gender equality were considered achievable simultaneously through both family and social prosperity. Meanwhile, the establishment of PKK was based on the Javanese cultural values that emphasized on patriarchal culture reflected in the 10 basic programs of PKK. The Economic aspect is a dominant influencing aspect of PKK due to poverty. In its development the political aspect became more influential resulted from the politicization of woman organization by setting up organization of wives including PKK. Power hegemony played important role in the formation of PKK. This was indicated by the decree issued by the Minister of Home Affair, Mendagri No. SUS/3/6/12 dated December 27, 1972.

The institutional paradigm developed by PKK was top-down paradigm based upon formal hierarchical structure from central level down regional level represented by the existence of patrons so that the main narration remained to have had the opportunity to dominate policies and to exercise control on the programs undertaken by the PKK. The educational paradigm led PKK to be responsible for domestic sector, while maintenance paradigm made PKK's burden heavier due to its responsibility to the family. Later a paradigm of empowerment was developed in order that PKK would be able to empower families although in reality the power remained in control. In the level of education and maintenance paradigm, the power directly exercises hegemony, while on the empowerment paradigm a consciousness of the power to apply empowerment appears although in reality it is only limited to slogan that makes PKK remain as a static movement. Deconstruction on PKK institution needs to be carried out in order that PKK could become an independent and empowered organization.

The values of PKK related to gender equality and justice include harmony, solidarity, justice, compatibility and equilibrium. The value of harmony indicates that PKK becomes (1) an organization aiming at building a family harmony; and (2) an organization that leads woman to create harmonious family, that is, a peaceful and comfortable family. Solidarity reflects that PKK becomes (1) an organization that grows as a manifestation of solidarity to woman movement; (2) an organization that tries to improve woman pride and dignity. The value of justice indicates that PKK is (1) an organization the endeavors to realize justice within families and society; (2) an organization that tries to actualize gender equality, so that men and woman assume the same status and role in life since woman have been so far considered as the other (*lyan*) while men are self. The value of compatibility reflects that PKK becomes (1) an organization aiming at creating ordered and peaceful condition in order to achieve spiritual and physical peace in the family; (2) an organization that is directed to the realization of good, polite and responsible attitude and behavior, obedient to social regulation and finally free from hegemony, domination, subordination and marginalization of women. The value of equilibrium indicates that PKK is (1) an organization

striving for equality in the family and society; (2) an organization that tries to realize gender equality between men and womanin order to share the same status and role in life.

RESEARCH NOVELTY

The research novelty includes (1) that the paradigm of empowerment developed by PKK indicates a change of organization toward an independent one although it is not optimal since the ruling power remains in control resulting in a hegemonic relationship between the power and PKK; (2) that existence of PKK provides womanwith a forum for creativities within the corridor of ruling power (men); PKK in Malang has made efforts to achieve gender equality and justice which is reflected in the involvement of men in the organization management although their existence is not significantly influential on planning, actuating and controlling the organization programs since PKK is still oriented to top-down policy.

CONCLUSION

It could be concluded that (1) the factors that influence the establishment are political, economical, social and cultural, (2) the institutional paradigm developed by PKK is top-down paradigm and moves from the concepts of education, maintenance and empowerment; (3) the value of PKK the related to the perspective of equality and justice, including solidarity, justice, compatibility and equilibrium.

BIBLIOGRAPHY

- Barker, C. 2004. *Cultural Studies, Teori dan Praktik*. Terjemahan. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri. 2005. *Hasil Rapat Kerja Nasional VI PKK*. Jakarta.
- Hadiz, L. 2004. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES.
- Lubis, A.Y. 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern: dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme Hingga Cultural Studies*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.

- Murniati, A.N.P. 2004. *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*. Buku Kedua. Magelang: Indonesiatara.
- Simon, R. 2000. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tong, R.P. 1999. *Feminist Thought*. Aquarini Priyatna Prabasmoro, terjemahan. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wieringa, S. 1998. *Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*. Terjemahan. Jakarta: Kalyanamitra.

ACKNOWLEDGEMENT

I would like to thank God for His blessing that has made me possible to complete my dissertation. My sincere thank also goes to Prof. Dr. I Gde Parimartha M.A., as my promotor, Prof. Dr. Hj. Keppi Sukesu, M.S., as my co-promotor for their attention, patience and persistence to support and motivate me starting from the period of proposal designing up to the completion of this dissertation. I would like to extend my thanks to various institutions that have given me scholarship through BPPS (P2T) of Udayana University and to the Rector, Director of Postgraduate Program and staffs, the Head of Cultural Studies Program and staffs.